

MGR. ALBERTUS SOEGIJAPRANATA PADA REVOLUSI FISIK 1945-1949

Aloysius Hara Purnama Yudha¹, Isawati, Dadan Adi Kurniawan²

Abstract

This journal discusses the role of Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ in defending Indonesia's independence after the proclamation of independence in 1945. Although Soegijapranata came from a minority group and is rarely mentioned in Indonesian revolution history, he was the first bishop appointed from the indigenous Indonesian population. In his role as a bishop, Soegijapranata sought to fully devote himself to the country and the nation in the hope of providing support for Indonesia's independence. He also played a role in gathering international support for Indonesian sovereignty through diplomatic efforts and writing. Soegijapranata's role not only had an impact on the country but also enhanced the image of the Catholic community, which was previously seen as supporters of the Netherlands. This research utilizes three theoretical perspectives, namely role, nationalism, and revolution, as analytical tools to uncover Soegijapranata's role in defending Indonesia's independence. The research methodology employed is a historical approach with historical analysis to reconstruct Soegijapranata's role in the physical revolution of 1945-1949. The research findings indicate that Soegijapranata played a significant role in defending Indonesia's independence through the relocation of the Catholic community's center of service to Yogyakarta, as well as diplomatic efforts and writing to gain international support. This study provides new insights into the role of minority figures in Indonesia's struggle for independence.

Keywords: *Soegijapranata, revolution, nationalism.*

PENDAHULUAN

Indonesia memproklamasikan kedaulatannya pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi Belanda belum rela melepaskan negara bekas jajahannya untuk merdeka. Belanda oleh sebab itu melancarkan Agresi Militer Belanda I & II untuk merebut Kembali kedaulatan Indonesia. Peristiwa dalam kurun waktu tersebut kerap dikenal dengan masa revolusi fisik Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945-1949 (Depdikbud, 1975: 144, 191). Mgr. Albertus Soegijapranata adalah salah satu dari sekian banyak tokoh yang terlibat dalam revolusi fisik.

Nama Uskup Soegija terdengar sedikit asing bagi sebagian besar orang awam,

¹ Mahasiswa pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

² Staff Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sebelas Maret.

karena selain Soegija berasal dari kaum minoritas, jarang sekali namanya disebut dalam pusaran sejarah revolusi Indonesia. Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ (Serikat Jesuit, salah satu ordo dalam Gereja Katolik) merupakan pribumi Indonesia pertama yang diangkat menjadi vikaris apostolik (Uskup). Soegija ditahbiskan menjadi Uskup di Vikariat Apostolik Semarang yang sekarang lebih dikenal selaku Keuskupan Agung Semarang. Vikariat Apostolik Semarang masih menjadi bagian dari Vikariat Apostolik Batavia (Bank, 1999: 36).

Rasa nasionalis serta solidaritas yang dimiliki Soegija terbentuk dengan menjalani kehidupannya selaku seorang imam. Beliau mengharapkan agar dirinya mampu mengabdikan dirinya secara penuh untuk negara serta bangsa dengan menjadi imam. Beliau pulang menuturkan bahwa pilihannya tersebut tidak sebatas berangkat dari faktor religius saja, tetapi dikarenakan terdorong oleh rasa nasionalisme. Karenanya beliau menginginkan dirinya untuk mengabdikan tidak sebatas pada gereja akan tetapi pula pada bangsa serta negara Indonesia (Gonggong, 2012:17)

Soegija turut terlibat untuk mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia di era pergerakan nasional karena rasa nasionalisme terhadap bangsanya. Soegijapranata memiliki andil untuk mengumpulkan simpati serutan dukungan mancanegara terhadap kedaulatan Indonesia khususnya pada masa pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau berupaya memperoleh pengakuan serta dukungan bagi kemerdekaan Indonesia dari sejumlah negara lainnya dengan cara berdiplomasi serta menulis. Peran Soegija dalam mempertahankan kemerdekaan membawa dampak bagi negara dan gereja. Selain berdampak pada negara, Soegija juga mengangkat citra umat Katolik yang tadinya dianggap sebagai kaki tangan Belanda. Keikutsertaan Soegija pada gerakan nasional melalui penggunaan asas Katolik dapat memperoleh simpati dari individu lain terhadap iman Katolik

KAJIAN TEORI

Penelitian ini menggunakan tiga kajian teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam menelusuri dan mengungkapkan bagaimana dan mengapa peran Soegijapranata berpengaruh dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi. Ketiga teori tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Peran

Makna peran dapat memiliki banyak interpretasi, yaitu interpretasi sejarah yang pertama. Menurut interpretasi sejarah, konsep peran asli didapat dari sekelompok individu yang berhubungan kuat dengan teater atau drama, yang diperlakukan di Roma kuno maupun Yunani. Peran pada konteks ini merujuk kepada peranan yang dimainkan ataupun dilangsungkan seorang aktor di panggung lakon tertentu. Berdasarkan pengertian ilmu sosial, peran adalah fungsi yang dilakukan seseorang saat memegang posisi tertentu. Seseorang dapat membuatnya berfungsi karena tempatnya (Djamarah, 1997: 31).

Berry (2003:105), mendefinisikan peranan selaku berharap kepada seseorang yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan ini merupakan penyeimbang norma masyarakat sosial sehingga peran ditentukan oleh norma masyarakat. Peran ini memiliki dua harapan, artinya ekspektasi pemegang peran terhadap individu atau ekspektasi pemegang peran terhadap komunitas yang memenuhi peran atau tugasnya.

Menurut Bruce J. Cohen dalam bukunya "*Introduction to Sociology*", peran dibedakan menjadi dua kategori, pertama peran dirumuskan atau peran normatif, yaitu keadaan sebenarnya seseorang pada saat melakukan suatu peran tertentu. Kedua, peran ideal yaitu peran yang diharapkan oleh masyarakat melalui penggunaan cara-cara yang sesuai dengan harapan (Cohen, 1992: 80).

2. Nasionalisme

Nasionalisme kerap diartikan selaku cinta terhadap tanah air yang tak bersyarat, selaku wujud perjuangan yang seolah membenarkan jalan apapun yang diperlukan untuk negara yang dicintainya, pengertian itu sendiri memicu interpretasi nasionalisme menjadi tidak berarti serta usang dalam konteks saat ini, yang tidak kembali berkuat pada masalah kolonial serta mencapai kemerdekaan dari rebutan penjajah (Sarman, 1995: 110).

Nasionalisme meliputi konteks yang cenderung meluas yakni kesetaraan kewarganegaraan serta keanggotaan untuk seluruh kelompok budaya serta etnis pada sebuah negara. Diperlukan kebanggaan menampilkan identitas nasional selaku sebuah negara pada kerangka nasionalisme. Kebanggaan itu sendiri ialah proses pembelajaran, bukan diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hara, 2005:21).

Nasionalisme adalah perasaan cinta yang dimiliki semua warga negara terhadap negaranya. Nasionalisme adalah ungkapan cinta dan kesetiaan kepada negara, yang diwujudkan dalam kemampuan untuk menjaga nama negara. Nasionalisme adalah paham yang melahirkan serta mempertahankan kedaulatan nasional melalui merealisasi konsep identitas kolektif bagi suatu kelompok orang (Solihatin, 2009:21). Pengertian nasionalisme asalnya dari istilah yang disebut bangsa (*nation*), sekelompok orang yang memiliki kesamaan bahasa, adat istiadat, asal-usul, budaya, nasib, tanggung jawab, dan tempat tinggal (negara) (Mustari, 2001:190).

3. Revolusi

Revolusi adalah istilah yang diterapkan pada perubahan mendasar dalam pemerintahan atau konstitusi politik suatu negara, terutama ketika muncul dari penyebab internal dan aksi bersenjata. Revolusi adalah sebuah perubahan sosial atau politik melalui kekuatan dan kekerasan yang diberikan pengaruh oleh kebangsaan serta konflik bersenjata. Revolusi pula diartikan sebagai perubahan sistem politik, tetapi dengan pesat serta menyeluruh lewat metode-metode di luar konstitusi serta mengingkari kelembagaan negara (Garner, 1999:1123).

Revolusi dipahami selaku proses yang sangatlah tidak biasa, memaksa serta menjadi pergerakan yang sangat terintegrasi dari semua pergerakan sosial. Revolusi pula dimengerti selaku ekspresi ataupun manifestasi terakhir dari kehendak bebas serta perasaan marah yang mendalam serta mencakup semua keterampilan organisasi, ideologi maupun protes sosial yang dilakukan secara kolektif. Pembebasan didasarkan oleh simbol kesetaraan, kemerdekaan serta kemajuan disertai asumsi bahwasanya revolusi akan melahirkan sebuah tatanan sosial yang semakin membaik dari sebelumnya (Eisenstadt, 1986: 3).

METODE PENELITIAN

Istilah metode asalnya dari istilah Yunani, *methodos*, yang mengartikan cara atau metode dalam kaitannya dengan usaha ilmiah. Metode asalnya dari istilah Yunani “*methods*”, yang mengartikan cara atau cara. Dalam kaitannya dengan soal-soal ilmiah, metode berarti cara kerja yang telah sistematis, merujuk kepada kaidah baku yang selaras dengan soal-soal ilmiah terkait serta hasilnya bisa dijelaskan dengan ilmiah

(Koentjaraningrat, 1977: 12). Riset ini didasarkan pada pertanyaan penelitian sejarah. Pemilihan metode sejarah dilandasi oleh pokok bahasan penelitian yakni kejadian sejarah di waktu lampau yang direkonstruksi menjadi cerita sejarah melalui metode analisis historis.

Analisis historis yang dilakukan pada riset ini adalah peran Soegijapranata dalam pergerakan nasional dan riset ini mempergunakan pendekatan historis. Hal tersebut didasari karena riset ini memiliki tujuan untuk merekonstruksikan, mendeskripsikan dan memaparkan kejadian di masa lalu. Dengan memaparkan berbagai sumber-sumber di waktu lampau maka bisa melahirkan fakta-fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan dengan ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan, menguji, menganalisis peninggalan serta data dari peristiwa dimasa lalu dan menuangkannya dalam penulisan sejarah mengenai peran Soegijapranata dalam revolusi fisik 1945-1949.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Soegijapranata dalam Revolusi Fisik (1945-1949)

1. Pemindahan Keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta

Saat perang dunia 2 mulai memperlihatkan indikasi menangnya pihak sekutu, banyak warga Belanda yang menginginkan kekuasaan Indonesia jatuh kembali di tangan kerajaan Belanda. Bisa dimaklumi bahwasanya hal itu menjadi semacam pelipur lara bagi kerajaan Belanda setelah negerinya porak-poranda karena perang yang terjadi dengan Jerman. Saat masyarakat Indonesia dengan gembira baru merasakan kemerdekaan yang mengartikan pembebasan dari seluruh wujud kolonialisme bangsa asing, Belanda masih mempunyai tekad untuk mengembalikan kekuasaannya atas kekayaan alam Indonesia. Tentara Belanda yang membonceng NICA dapat kembali ke Indonesia tak lama setelah proklamasi kemerdekaan. Sebenarnya NICA bukanlah organisasi yang didirikan oleh pihak Belanda, akan tetapi organisasi yang dibentuk oleh sekutu Amerika, tapi tidak sedikit masyarakat Belanda yang dijadikan sebagai anggota NICA. Belanda memanfaatkan keadaan ini untuk merebut kekuasaan Indonesia, hingga pertempuran kembali pecah antara pasukan Belanda dan Indonesia di berbagai wilayah.

Belanda melancarkan dua operasi militer dalam usahanya untuk kembali menduduki Indonesia. Ketika mendengar kabar proklamasi kemerdekaan, Soegijapranata segera menginstruksikan untuk dibuatkan pusaka merah putih berukuran besar. Bendera itu sendiri kemudian dikibarkan di depan pastoran Gedangan, Semarang. Semenjak kala itu, halaman gedung tersebut senantiasa dihiasi dengan bendera merah putih RI yang dikibarkan setiap harinya (Gonggong. 1993:50).

Sementara itu, di Jakarta sudah berkembang tidak kondusif untuk penyelenggaraan pemerintahan, dan menjadikan keselamatan para pemimpin negara terancam. Pemerintah Indonesia memutuskan pada tanggal 4 Januari 1946 secara diam-diam memindahkan ibukota ke Yogyakarta. Pindahan itu bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan dan melindungi pemerintahan Indonesia (Toer. 1999: 43).

Konsisten dengan upaya tersebut, Soegijapranata meningkatkan dukungannya kepada pemerintah RI melalui pemindahan pusat layanan umat Katolik di daerahnya ke Jogjakarta yang dulunya berada di Semarang terhitung sejak 13 Februari 1947. Dipilihnya tanggal itu sendiri dikarenakan satu hari sebelumnya pada tanggal 12 Februari 1947, Presiden Soekarno memberikan seruan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia. Karena itu, Soegija segera bergegas untuk berangkat ke Yogyakarta begitu situasi aman.

Keputusannya untuk berpindah ke Yogyakarta telah dipikirkan matang-matang. Dengan alasan Semarang telah diduduki oleh tentara Belanda, Soegijapranata selaku seorang Uskup mendukung penuh keberadaan negara Indonesia secara penuh. Selaku seorang nasionalis, Soegija membuat keputusan yang menguntungkan bangsa dan negaranya. Keputusan kepindahan Soegija didasari pada fakta bahwa ia dapat mengawasi dengan langsung kondisi serta keadaan birokrasi Indonesia dan bisa berkomunikasi langsung dengan para pimpinan negara. Di Yogyakarta, beliau diterima oleh Presiden serta dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya. Menurut kantor berita Antara, pada pertemuan tersebut Soegijapranata mengatakan pada presiden bahwasanya dirinya siap mengemban tugas mengajarkan para umatmu untuk menjadi warga negara yang taat. Beliau menyampaikan bahwa umat Katolik memiliki kewajiban

untuk mendukung pemerintahan republik sudah merdeka saat ini (Bank. 1999: 380).

2. Diplomasi dengan Pihak Vatikan

Dari tanggal 13 Februari 1947 sampai 17 Agustus 1949, Soegija bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia yang memindahkan pusat pemerintahan sejak Juni 1946 ke Yogyakarta. Sebelum hijrah ke Yogyakarta, atau tepatnya pada 18 Januari 1947 Soegija telah mengambil Langkah maju melalui upaya diplomasi melalui dikirimkannya surat pada kardinal Fumasoni Biondi, ketua Kongregasi Propaganda Fide di Vatikan. Surat itu memiliki tiga tema utama yang ditulis oleh Soegija. Tema pertama ialah pengalaman sikap militer Jepang terhadap tugas misionaris di Indonesia. Kedua, situasi terkini mengenai upaya diplomasi pemerintah Indonesia terhadap Belanda dan yang ketiga rencana pengangkatan nuntius untuk Indonesia. Pada poin yang ketiga, Soegija menyampaikan pendapat kepada pihak Vatikan supaya nuntius yang akan diangkat tidak boleh berkewarganegaraan Amerika atau Belanda. Nuntius adalah perwakilan Paus, oleh sebab itu diharapkan nuntius yang ditunjuk tidak ikut campur dalam arena politik. Mempertimbangkan saran Soegija, pihak Vatikan akhirnya mengangkat Mgr. George de Jonge d'Ardoya dari Finlandia selaku nuntius untuk Indonesia (Subanar. 2012:42-43). Mgr. George de Jonge d'Ardoya menjadi duta besar Vatikan untuk Indonesia sejak tanggal 7 Juli 1947.

Usulan Soegija agar Vatikan tidak memilih duta besar yang berkebangsaan Amerika dan Belanda sengaja dilakukan agar kehadiran nuntius tersebut tidak menimbulkan kontroversi baru dikalangan rakyat Indonesia. Jika duta besar yang ditunjuk adalah orang berkebangsaan Belanda atau Amerika, dikhawatirkan akan ada reaksi baik dari masyarakat. Pada periode revolusi pasca kemerdekaan, masyarakat Indonesia sangat memusuhi orang Katolik berkebangsaan Belanda.

3. Menyuarakan Gencatan Senjata

Serangan Belanda pada tanggal 21 Juli 1947 atau yang sering disebut sebagai agresi militer Belanda I memicu pendudukan daerah Jawa Tengah oleh Belanda. Hingga 30 Juli 1947 tentara Belanda menembak jatuh sebuah pesawat Dakota yang membawa suplai obat-obatan. Penyerangan tersebut menewaskan

pilot pesawat Dakota yaitu Adi Soetjipto. Ketika memperoleh berita wafatnya Adi Sucipto, Soegijapranata yang tengah ada di solo untuk hadir pada misa peringatan Hari Santo Ignatius: hari pasca kejadian penembakan pesawat Dakota, beliau Pada jam 8 malam menyampaikan pidatonya di studio Purwosari yakni RRI solo. Pada pidato itu sendiri beliau meminta pihak Indonesia serta Belanda untuk melakukan negosiasi terdapatnya suatu pencatatan senjata. Gencatan senjata sangat krusial guna menjaga kehormatan kedua belah pihak di mata internasional menurut Soegijapranata (Naskah Catatan Harian Soegijapranata, 1 Agustus 1947).

Saat 4 Agustus 1947, Indonesia serta Belanda akhirnya menyetujui adanya gencatan senjata antara kedua belah pihak. Namun demikian, pihak Belanda masih terus menerus menyerang serta berupaya meluaskan daerah pendudukannya di Indonesia. Merespon hal itu sendiri, PBB sesegera mungkin mengambil tindakan melalui pembentukan suatu komisi yang dinamakan KTN. KTN ditugaskan guna mewadahi pertemuan dua negara yang berkonflik pada suatu perundingan. Hingga kemudian saat 8 Desember 1947, dua negara setuju untuk menghentikan aksi tembak-menembak. Perjanjian itu sendiri menjadi suatu hasil dari perundingan renville. Hasil dari perundingan tersebut kemudian disepakati secara resmi pada 17 Januari 1948.

4. Menulis di Media Luar Negeri

Secara khusus, partisipasi Soegijapranata pada diplomasi terkait dengan kejadian agresi militer Belanda 2 ialah saat tulisannya termuat di koran The Commonweal terbitan Amerika. Soegija menulis tentang beragam penyerangan yang dilancarkan tentara Belanda serta akibat dari penyerangan itu sendiri terhadap kehidupan masyarakat pribumi khususnya kaum anak, misalnya kebodohan serta kemiskinan. Artikel Soegijapranata yang diterbitkan di koran Amerika itu sendiri memperoleh respon yang amat baik oleh dunia internasional. Soegijapranata terbukti mendapatkan dukungan berupa pengiriman bantuan majalah serta buku dari sejumlah pihak untuk anak-anak yang terdampak perang di Indonesia (The Commonweal. 1948:1).

Artikel Soegija di sela-sela surat kabar The Commonweal, tidak mengesampingkan peran seorang peneliti Amerika yang bernama G. Mc. T. Kahin. Kahin saat itu sedang berada di Yogyakarta untuk melakukan penelitian tentang

Indonesia. Dalam kunjungannya, G. Mc. T. Kahin menyempatkan diri untuk bertemu Soegija dan berbicara langsung dengan Soegija tentang situasi Indonesia pasca Proklamasi. Pertemuan antara Soegija dengan G. Mc. T. Kahin dicatat Soegija dalam catatan harian yang tertanggal 19 November 1948 (Catatan Harian Soegijapranata, Jumat 19 November 1948).

5. Diplomasi dengan Pihak Keraton Yogyakarta

Soegijapranata memberikan himbauan supaya Sultan tidak keluar dari istana. Hal itu sendiri ditulisnya pada catatan harian yang mencatat tanggal 5 Januari 1949. Soegijapranata mengirimkan surat itu sendiri pada Sultan Hamengkubuwono 9 dikarenakan mendapat berita terdapatnya niatan sultan yang ingin turut pada peperangan gerilya yang dipimpin oleh jenderal Sudirman. Soegijapranata menuliskan pada surat itu sendiri, apabila Sultan sampai keluar dari istana serta hal tersebut diketahui oleh pihak penjajah, dengan demikian pasukan Belanda berkemungkinan besar bertindak kekerasan pada masyarakat dan pula dapat melahirkan perpecahan pada tubuh Keraton Yogyakarta sebagaimana yang telah pernah dilakukan Belanda di waktu lampau (Catatan Harian Soegijapranata pada hari Rabu, 5 Januari 1949).

Mempertimbangkan saran dan masukan dari Soegija, maka Sultan Hamengkubuwono IX membatalkan niatnya untuk turut serta pada peperangan gerilya. Sultan Hamengkubuwono 9 memilih untuk mengawasi keadaan Yogyakarta dari dalam istana. Tidak sebatas sampai di situ saja peran Soegijapranata pada diplomasi pula dilaksanakan beliau melalui tulisannya serta hasil wawancaranya dengan sejumlah wartawan dari dalam maupun luar negeri. Hal itu sendiri bisa kita ketahui dari catatan harian Soegijapranata yang menuliskan tanggal 14 Februari 1949 (Catatan Harian Soegijapranata 14 Februari 1949).

B. Dampak yang Ditimbulkan dari Peran Soegijapranata dalam Revolusi Fisik (1945-1949)

1. Dampak Bagi Gereja dan Umat Katolik di Indonesia

Pasca menempuh jalan yang panjang guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kemudian tanggal 27 Desember 1949 Belanda akhirnya setuju untuk memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia. Peperangan diplomasi maupun

fisik yang dari sejumlah pihak akhirnya dibayar oleh persetujuan Belanda. Baik dari kalangan pemerintah maupun rakyat biasa rela berkorban pemikiran, tenaga bahkan nyawanya untuk mencapai kemerdekaan. Salah seorang tokoh yang memiliki jasa pada perjuangan untuk memerdekakan Indonesia adalah Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ atau lebih dikenal dengan Soegija. Kendati bukan dari kalangan pemerintah akan tetapi Soegijapranata berinisiatif secara mandiri dalam partisipasinya memperjuangkan kemerdekaan (Gonggong. 1993:51).

Selaku seorang pemuka agama Katolik, beliau kerap memberikan himbauan terhadap umat Katolik baik yang pribumi ataupun non pribumi agar secara kolektif turut serta untuk berjuang bagi kemerdekaan Indonesia. Beliau meminta semua umatnya di Indonesia agar tidak melihat warna kulit ataupun kelas sosial antar satu sama lain. Beliau memberikan himbauan supaya semua umat Katolik di Indonesia dapat memberi yang terbaik yang dimilikinya bagi negara serta bangsa. Melalui cara semacam itu menjadikan umatnya dapat menjadi seorang Katolik yang sesungguhnya (Swaratama. 1941:5).

Banyak masyarakat pribumi non Katolik pada masa penjajahan Belanda hingga masa revolusi yang menilai umat Katolik menjadi kaki tangan pemerintah Belanda. Soegijapranata pernah berpidato dalam salah satu kesempatan yang menyatakan bahwa keikutsertaannya pada gerakan nasional melalui penggunaan asas Katolik dapat memperoleh simpati dari individu lain terhadap iman Katolik adalah apalagi upaya itu sendiri menjadi jawaban yang tepat guna menyangkal tuduhan yang menyebut bahwasanya orang Katolik pribumi ialah kaki tangan kolonial (Subanar.2012:76). Soegija berupaya dalam mengubah perspektif masyarakat non Katolik serta berniat mempersatukan seluruh umat beragama.

Salah satu wujud apresiasi Presiden Soekarno kepada umat Katolik di Indonesia ialah melalui dihadihkannya suatu lukisan Bunda Maria yang ia beli dari seorang pelukis asal Italia yang kemudian diberikan kurir pada Soegijapranata saat 10 Agustus 1948. Di samping itu bersama dengan lukisan Bunda Maria itu sendiri, presiden pula menulis sekuntum surat yang diperuntukkan bagi Soegijapranata. Pada bagian penutup kemudian presiden mengutarakan harapannya pada umat Katolik di Indonesia agar tetap sejahtera dalam Republik Indonesia (Catatan Harian Soegijapranata pada hari Selasa, 10 Agustus 1948).

Peranan Soegijapranata pada diplomasi kemerdekaan Indonesia berdampak positif untuk kemajuan serta eksistensi gereja serta umat Katolik di Indonesia pada kehidupan bangsa serta negara. Keberadaan Soegijapranata pada kancah perpolitikan Indonesia pula berdampak baik untuk umat Katolik Indonesia karena dirinya pula memperjuangkan umat Katolik Indonesia supaya mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia yang baru saja meraih kemerdekaan

2. Dampak Bagi bangsa Indonesia

Soegija Pada pelaksanaan upaya diplomasi sukses meyakinkan sejumlah pihak dalam memberikan dukungan terhadap kedaulatan serta kemerdekaan RI selaku suatu negara serta bangsa. Soegijapranata pula memberi sejumlah saran pada Vatikan untuk menunjuk nuntius Vatikan di Indonesia pada balasan surat tersebut. Beliau mengutarakan supaya luntius yang ditunjuk adalah sosok yang bisa seluruh pihak terima, baik pihak penguasa sipil maupun pemerintah Indonesia. Menjadi wakil dari paus, sebaiknya beliau adalah sosok yang bisa membangun kerjasama dengan seluruh uskup serta tidak dilibatkan dalam ranah perpolitikan. Soegijapranata menyampaikan hal itu sendiri supaya nanti keberadaan luntius itu sendiri tidak memicu pro kontra, hingga mesti dipertimbangkan juga kewarganegaraannya. Soegijapranata mengutarakan juga hendaknya apabila nuntius asalnya dari Finlandia ataupun Italia, bukan dari Belanda maupun Amerika. Saran itu sendiri ditujukan supaya asal usul kebangsaan nuntius tidak dipersoalkan di kemudian hari (Subanar. 2013:42-43).

16 Maret 1947 Vatikan menyatakan pengakuan atas kemerdekaan serta kedaulatan baik secara de facto maupun de jure Indonesia selaku bangsa dan negara. Vatikan turut memberikan himbauan pada pemerintah Belanda agar memberhentikan aksi militernya di Indonesia. Vatikan menjadi negara yang cukup mempengaruhi politik dunia, terutama Inggris serta Amerika. Hal tersebut disebabkan pada PBB, nuntius Vatikan menjadi ketua Yang menaungi semua duta besar seluruh negara barat. Melalui dukungan Vatikan atas merdekanya Indonesia, harapannya bisa berdampak bagi suara dari sejumlah negara Eropa lain supaya turut memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Tentu hal itu sendiri merupakan penyemangat untuk pemerintah maupun masyarakat Indonesia agar

selalu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dikarenakan Kian banyaknya pihak eksternal yang mendukung terealisasinya kemerdekaan Indonesia secara holistik (Subanar. 2007: 79) Melalui pengakuan yang diberikan Vatikan tersebut menjadi sesuatu yang berarti untuk pemerintah Indonesia serta masyarakat.

3. Dampak dari Menyuarakan Gencatan Senjata

Soegija dengan berani menyerukan gencatan senjata melalui siaran radio dari Studio Poerwosari (RRI Solo) pada tanggal 2 Agustus 1947 (Catatan Harian Soegijapranata tanggal 2 Agustus 1947). Aksi Soegija menyuarakan gencatan senjata pada peristiwa Agresi Militer Belanda I berhasil didengar PBB untuk diadakan perundingan antara kedua belah pihak. Pada tanggal 4 Agustus 1947 kedua belah pihak setuju untuk menghentikan kontak senjata. Dampak paling signifikan dari seruan gencatan senjata Soegija yaitu respon PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN). KTN bertugas mempertemukan kedua belah pihak untuk melakukan perundingan. KTN menghasilkan perundingan Renville antara Belanda dan Indonesia yang salah satu isinya adalah persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak (Sarjono. 1999: 22).

4. Dampak Diplomasi dengan Media Luar Negeri

Soegija mendapat kesempatan menjelaskan pandangannya terhadap situasi penjajahan Belanda di Indonesia melalui surat kabar terbitan Amerika yaitu *The Commonweal*. Tulisan Soegija berdampak pada dukungan dan simpati dunia internasional khususnya bangsa barat terhadap kondisi peperangan di Indonesia. Soegija melalui tulisannya mendeskripsikan bahwa serangan Belanda dalam aksi Agresi Militer Belanda II sangat berdampak buruk terutama bagi pendidikan anak-anak Indonesia. Tulisan Soegija direspon positif oleh dunia internasional yang berdampak dengan datangnya bantuan buku-buku dan majalah bagi anak-anak Indonesia (*The Commonweal*. 1948:7).

5. Dampak Diplomasi dengan Pihak Keraton

Soegija menghimbau Sultan Hamengkubuwono IX untuk tidak meninggalkan istana dan ikut serta dalam perang gerilya bersama Jenderal Soedirman. Dampak dari aksi Soegija ialah Sultan Hamengkubuwono IX mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan perang dan tetap memantau situasi Yogyakarta dari dalam istana. Implikasi dari tindakan Sultan tetap tinggal didalam

istana ialah suksesnya Serangan Umum 1 Maret dalam aksi merebut Yogyakarta dari pendudukan Belanda dan menghambat berlanjutnya Agresi Militer Belanda II. Keputusan Sultan untuk tetap tinggal dalam istana pula menghambat intervensi Belanda terhadap Kesultanan Yogyakarta sehingga situasi perang di Yogyakarta dapat diminimalisir.

SIMPULAN

Peran Soegija dalam mempertahankan kemerdekaan yaitu, memindahkan pusat keuskupan dari Semarang ke Yogyakarta supaya lebih mudah untuk memantau situasi dan kondisi pemerintah Indonesia serta mempermudah komunikasi dengan para pemimpin negara ketika ibu kota NKRI dipindahkan sementara ke Yogyakarta. Soegija pula berdiplomasi dengan pihak Vatikan dalam hal pemilihan wakil Vatikan bagi NKRI. Soegija menyerukan gencatan senjata melalui radio ketika Agresi Militer Belanda I berlangsung. Aksi Soegija direspon oleh PBB dengan membentuk KTN (Komisi Tiga Negara) yang salah satu hasil perundingannya ialah penghentian aksi tembak menembak. Soegija pula berdiplomasi dengan media luar negeri melalui tulisan-tulisannya pada surat kabar *The Commonweal* milik Amerika. Melalui tulisannya Soegija menggalang simpati dan empati dunia Internasional terhadap situasi perang di Indonesia yang kian memburuk dan menyengsarakan rakyat. Soegija berdiplomasi pula dengan pihak keraton Yogyakarta yang menghimbau supaya Sultan Hamengkubuwono IX tetap tinggal di istana dan tidak ikut perang gerilya. Dampak dari keikutsertaan Soegija dalam mempertahankan kemerdekaan pasca proklamasi yaitu, menyangkal tuduhan umat pribumi yang menganggap umat katolik selaku kaki tangan pemerintah Belanda. Soegija membuktikan bahwa bergabung dalam pergerakan nasional melalui penggunaan asas Katolik akan menarik simpati orang lain pada iman Katolik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank, Jan. (1999). *Katolik Di Masa Revolusi Indonesia*. Jakarta: Grando-Perwakilan Koninklijk Instituut voor Taal, Land En Volkenkunde
- Berry, David. (2003). *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cohen, Bruce J. (1992). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rineka Cita.
- Depdikbud. (1975). *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamarah, Syaiful. (1997). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT Rineka Cita.

- Eby Hara, Abubakar. (2005). *Nasionalisme Indonesia "Dari Nasionalisme Lokal ke Nasionalisme Kosmopolit?"*. Jakarta: Akbar Tandjung Institute
- Garner, Bryan. (1999). *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. St. Paul, Minn: West Group.
- Gonggong, Anhar dkk. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI Republik Indonesia: dari Proklamasi sampai Demokrasi terpimpin*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi.
- Koentjaraningrat. (1977). *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Mustari, Muhammad. (2011). *Nilai Karakter*. Yogyakarta: Laksbang Press Indo
- S.N., Eisenstadt. (1986). *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*, terj. Candra Johan. Jakarta: CV Rajawali.
- Sarjono. (1999). *Peran Australia Dalam Penyelesaian Konflik Indonesia dan Belanda Melalui Perundingan Renville*. Jurnal Ilmiah Guru COPE, No. 01/Tahun III/Mei 1999.
- Sarman, M. *Memahami Kembali Nasionalisme*. Kompas, 19 Mei 1995.
- Solihatini, Etin. (2009). *Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subanar, Budi. (2007). *Menuju Gereja Mandiri; Sejarah Keuskupan Agung Semarang Dibawah Dua Uskup*. Yogyakarta: Sanata Dharma.
- Subanar, Budi. (2012). *Kilasan Kisah Soegijapranata*, Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia.
- Subanar, Budi. (2012). *Soegija, Catatan Harian Seorang Pejuang Kemanusiaan*, Yogyakarta: Galang Press.
- Subanar, Budi. (2013). *Soegija Si Anak Betlehem Van Java*. Yogyakarta: Kanisius.
- Majalah Swaratama, No 9, Desember 1941. Balai Bahasa Jawa Jateng.
- The Commonweae. "Communications The Commonweal in Indonesia ". 31 Desember 1948. Sumber <delpher.nl>
- Toer, Pramoedya Ananta. (1999). *Kronik Revolusi Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.